

## ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan di berbagai bidang terutama dalam bidang ekonomi dan hukum, maka peranan yang diharapkan oleh masyarakat dari seorang notaris tidak hanya terbatas pada tugas jabatannya saja, bahkan peranan di luar tugas jabatan notaris yang diharapkan oleh masyarakat lebih luas daripada tugas jabatan notaris. Namun, karena banyaknya perkembangan dan perubahan dalam praktik, maka dikeluarkannya undang-undang yang baru tentang jabatan notaris pada tanggal 15 Januari 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang selanjutnya disebut Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dengan dikeluarkannya undang-undang yang baru, saya sangat tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari undang-undang baru jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang lama.

Tolok ukur pengaturan yang lebih baik adalah pengaturan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Pengkajian dilakukan dengan terutama dengan *common sense* (logika berpikir yang bisa diterima secara umum) dengan memperhatikan pula kenyataan yang ada secara nyata dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## ABSTRACT

Along with the progress in various fields, especially in economics and law, the role expected by society of a notary is not just limited to his duty, even beyond the role of a notary office tasks expected by the wider public than notary office tasks. However, because of the many developments and changes in the practice, then the passage of the new law on notary office on January 15, 2014 the Act No. 2 of 2014, hereinafter referred to as Notary Position Act Amendment.

With the passage of the new Act, I am very interested to study it more deeply, to find out the advantages and disadvantages of the new Act compared with the old Act No. 30 of 2004.

The better setting standard is a setting that is more beneficial to the community. The assessment was done primarily by common sense (logical thinking that is acceptable in general) also taking into account the real fact of the reality and Act Number 12 of 2011 on the Establishment of Legislation.